



## Implementasi Model Koperasi Digital Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Desa

Mukhtar Galib<sup>1</sup>, Andi Ardasanti<sup>2</sup>, Maulana<sup>3</sup>, Amiruddin<sup>4</sup>, Sukarno Hatta<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasharan Jaya Makassar, Indonesia

### Histori Artikel:

Pengajuan : 9 Desember 2025

Revisi : 30 Januari 2026

Diterima : 9 Februari 2026

**Keywords:** Digital Cooperatives, Rural Economy, Financial Inclusion, Social Innovation.

### Abstract

*The development of digital technology presents new opportunities for strengthening the village economy, one of which is through the implementation of digital cooperatives. This article aims to examine digital cooperatives as an instrument for village economic development by highlighting aspects of governance, market expansion, financial inclusion, and member participation. The study was conducted through a literature analysis and conceptual review of digital cooperative practices in the context of rural development. The results indicate that digital cooperatives are able to improve administrative efficiency, strengthen transparency, and build member trust through a technology-based recording system. Furthermore, digital cooperatives expand market access for village products through e-commerce integration and encourage financial inclusion with digital savings and loan services. Member participation is further strengthened through applications that facilitate online meetings, electronic voting, and youth engagement as a form of social innovation. However, challenges such as low digital literacy, limited infrastructure, and limited management capacity require public policy support, multi-stakeholder collaboration, and sustainable empowerment.*

### Abstraksi

Perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang baru dalam penguatan ekonomi desa, salah satunya melalui implementasi koperasi digital. Artikel ini bertujuan mengkaji koperasi digital sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa dengan menyoroti aspek tata kelola, perluasan pasar, inklusi keuangan, serta partisipasi anggota. Kajian dilakukan melalui analisis literatur dan telaah konseptual terhadap praktik koperasi digital dalam konteks pembangunan pedesaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa koperasi digital mampu meningkatkan efisiensi administratif, memperkuat transparansi, serta membangun kepercayaan anggota melalui sistem pencatatan berbasis teknologi. Selain itu, koperasi digital memperluas akses pasar produk desa melalui integrasi e-commerce dan mendorong inklusi keuangan dengan layanan simpan pinjam digital. Partisipasi anggota semakin diperkuat melalui aplikasi yang memfasilitasi rapat daring, voting elektronik, dan keterlibatan generasi muda sebagai bentuk inovasi sosial. Namun, tantangan berupa literasi digital yang rendah, keterbatasan infrastruktur, dan kapasitas pengurus menuntut dukungan kebijakan publik, kolaborasi multi-stakeholder, serta pemberdayaan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Koperasi Digital, Ekonomi Desa, Inklusi Keuangan, Inovasi Sosial.

### Penulis Korespondensi:

Mukhtar Galib

[mukhtargalib.stimlash@gmail.com](mailto:mukhtargalib.stimlash@gmail.com)



## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi desa di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang berakar pada keterbatasan akses pasar, permodalan, teknologi, dan informasi (Rahmat, A., *et al.* 2023). Masyarakat desa yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian, perikanan, peternakan, serta kerajinan tradisional belum sepenuhnya mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan keterampilan yang dimiliki untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan ekonomi antara desa dan kota masih cukup lebar, sehingga mendorong urgensi pencarian model kelembagaan yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut.

Koperasi sejak lama dikenal sebagai kelembagaan ekonomi rakyat yang melekat dalam kehidupan desa. Prinsip kebersamaan, keadilan, dan gotong royong yang melekat pada koperasi menjadikannya instrumen strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat (Kusumastuti, D., *et al.* 2022). Namun, koperasi konvensional di banyak desa mengalami stagnasi, baik karena keterbatasan manajemen, kurangnya transparansi, maupun minimnya inovasi dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Situasi ini memperlemah daya tarik koperasi terutama bagi generasi muda desa yang lebih tertarik pada aktivitas ekonomi digital.

Transformasi koperasi menuju bentuk digital menjadi peluang untuk mengembalikan relevansinya dalam pembangunan ekonomi desa (Galib, M., *et al.* 2025). Model koperasi digital menggabungkan prinsip-prinsip koperasi tradisional dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan aplikasi keuangan, sistem manajemen berbasis cloud, serta platform pemasaran digital membuka ruang bagi koperasi untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan. Dengan demikian, koperasi digital berpotensi menjadi instrumen pembangunan desa yang modern, adaptif, dan inklusif.

Koperasi digital juga menghadirkan peluang baru dalam mempercepat akses layanan keuangan masyarakat desa (Galib, M., *et al.* 2025). Pencatatan simpan pinjam dapat dilakukan secara real-time, laporan keuangan lebih transparan, dan distribusi hasil usaha koperasi berlangsung lebih efisien. Melalui integrasi dengan platform e-commerce, produk-produk desa dapat menjangkau pasar yang lebih luas, mengurangi ketergantungan pada rantai distribusi panjang, serta meningkatkan nilai tambah. Keunggulan ini memperlihatkan bahwa koperasi digital bukan hanya alat kelembagaan ekonomi, tetapi juga sarana transformasi sosial masyarakat desa.

Namun, penerapan koperasi digital di desa tidak lepas dari hambatan. Literasi digital masyarakat pedesaan masih relatif rendah, sehingga menghambat pemanfaatan optimal teknologi (Izhari, F., *et al.*, 2024). Banyak anggota koperasi yang belum terbiasa menggunakan perangkat pintar maupun aplikasi daring. Selain itu, keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah desa turut menjadi penghalang signifikan. Tanpa pendampingan yang

intensif, penerapan koperasi digital berisiko tidak berjalan efektif dan hanya menjadi wacana tanpa keberlanjutan.

Selain hambatan teknis, persoalan sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi digital juga menjadi tantangan tersendiri. Pengurus koperasi desa pada umumnya belum memiliki kompetensi memadai dalam manajemen berbasis teknologi, pemasaran digital, maupun keamanan data (Cao, A., Guo, L., & Li, H. 2025). Padahal, keberhasilan koperasi digital sangat bergantung pada profesionalisme dan kemampuan pengurus dalam mengelola lembaga secara transparan dan akuntabel. Keterbatasan kapasitas ini menuntut adanya dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Dari sisi kebijakan, dukungan pemerintah desa maupun daerah terhadap pengembangan koperasi digital masih terbatas. Program digitalisasi di tingkat desa kerap terhenti di tengah jalan karena minimnya alokasi anggaran atau lemahnya sinergi antar-stakeholder. Padahal, keberhasilan model koperasi digital sangat ditentukan oleh adanya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat desa itu sendiri. Tanpa sinergi tersebut, koperasi digital akan sulit berkembang menjadi pilar ekonomi desa yang tangguh.

Faktor budaya juga memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan koperasi digital di desa. Banyak masyarakat yang masih terbiasa dengan transaksi tunai dan menaruh rasa curiga terhadap sistem elektronik yang dianggap rumit atau berisiko. Perubahan perilaku ekonomi masyarakat membutuhkan proses sosialisasi yang intensif, disertai dengan edukasi yang menekankan keamanan serta transparansi koperasi digital. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital hanya dapat terbangun melalui pengalaman nyata yang menunjukkan manfaat dan keamanannya.

Meskipun menghadapi tantangan, koperasi digital membuka peluang bagi keterlibatan generasi muda desa yang relatif lebih akrab dengan teknologi. Pemuda dapat berperan sebagai pengelola sistem digital, fasilitator pelatihan, maupun inovator lokal yang mengembangkan produk berbasis teknologi. Dengan melibatkan pemuda, koperasi digital tidak hanya menjadi sarana ekonomi, tetapi juga instrumen regenerasi kelembagaan desa yang berkelanjutan. Hal ini memperkuat posisi koperasi digital sebagai pendorong transformasi sosial-ekonomi di tingkat lokal.

Sejumlah praktik baik koperasi digital di berbagai daerah telah membuktikan potensi model ini. Misalnya, koperasi simpan pinjam yang menggunakan sistem digital untuk mencatat transaksi dan melaporkan keuangan berhasil meningkatkan transparansi dan partisipasi anggota. Demikian pula koperasi produksi yang memanfaatkan platform daring dalam pemasaran produk mampu meningkatkan pendapatan anggotanya secara signifikan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa koperasi digital bukan sekadar konsep, melainkan solusi nyata untuk memperkuat ekonomi desa.

Selain aspek ekonomi, koperasi digital juga mendorong inklusi keuangan

di desa (Galib, M., et al. 2025). Anggota yang sebelumnya sulit mengakses lembaga keuangan formal dapat memperoleh layanan keuangan melalui platform koperasi digital dengan biaya yang lebih murah dan proses lebih cepat. Layanan keuangan berbasis digital memungkinkan anggota di wilayah terpencil untuk melakukan transaksi tanpa harus ke pusat kota, sehingga meningkatkan literasi keuangan sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi formal.

Oleh karena itu, pengembangan model koperasi digital sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa menjadi semakin mendesak. Koperasi digital menawarkan efisiensi, transparansi, serta partisipasi aktif anggota yang relevan dengan tuntutan zaman. Pada saat yang sama, model ini berpotensi mengurangi kesenjangan ekonomi desa-kota dan memperkuat fondasi ekonomi lokal yang mandiri. Artikel ini bertujuan untuk membahas konsep koperasi digital dalam konteks pembangunan desa, menggali tantangan implementasinya, serta menawarkan gagasan strategi agar koperasi digital dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, urgensi koperasi digital juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menekankan pada transformasi digital dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis teknologi. Pemerintah melalui berbagai program smart village dan literasi digital telah membuka ruang untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembangunan desa. Dalam konteks ini, koperasi digital dapat menjadi instrumen implementatif yang menjembatani antara kebijakan makro dengan kebutuhan riil masyarakat desa. Dengan demikian, pembentukan koperasi digital bukan hanya respons terhadap perubahan zaman, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan yang terencana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini berfokus pada pembahasan konsep koperasi digital sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa. Analisis diarahkan pada potensi, tantangan, serta strategi implementasi yang memungkinkan model koperasi digital dapat diadopsi secara luas di pedesaan Indonesia. Harapannya, artikel ini dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kelembagaan ekonomi desa yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, serta menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan dalam mengembangkan ekonomi desa berbasis digital.

## **HASIL**

### **Model Koperasi Digital untuk Pembangunan Ekonomi Desa**

Model koperasi digital yang diusulkan dalam kajian ini berangkat dari kebutuhan untuk menjembatani keterbatasan kelembagaan konvensional dengan peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital. Secara konseptual, model ini mengintegrasikan lima pilar utama, yaitu: kelembagaan koperasi yang transparan, layanan keuangan digital yang inklusif, pemasaran produk berbasis

e-commerce, peningkatan literasi digital anggota, serta dukungan infrastruktur dan regulasi pemerintah. Kelima pilar tersebut dirancang untuk saling memperkuat sehingga membentuk sebuah ekosistem koperasi digital yang adaptif terhadap dinamika ekonomi desa.

Pada aspek kelembagaan, koperasi digital dikelola dengan sistem pencatatan berbasis aplikasi yang memfasilitasi transparansi keuangan, akuntabilitas, dan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Pilar layanan keuangan digital diwujudkan melalui simpan pinjam berbasis aplikasi, integrasi dengan fintech, hingga penggunaan dompet digital koperasi, sehingga akses keuangan masyarakat desa menjadi lebih cepat, murah, dan mudah. Pilar pemasaran digital berfokus pada penguatan posisi produk desa melalui platform e-commerce koperasi, yang memungkinkan perluasan pasar ke tingkat regional, nasional, bahkan internasional.

Di sisi lain, literasi digital dan pendampingan menjadi pilar pendukung agar anggota koperasi benar-benar mampu memanfaatkan layanan digital secara optimal. Hal ini mencakup pelatihan penggunaan aplikasi, manajemen usaha digital, hingga perlindungan data anggota. Pilar terakhir adalah dukungan infrastruktur dan kebijakan, di mana pemerintah desa dan daerah diharapkan berperan dalam penyediaan akses internet, perangkat teknologi, serta regulasi yang kondusif. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan akademisi akan menjadi faktor penentu dalam memastikan keberhasilan model koperasi digital.

Dengan demikian, model koperasi digital yang ditawarkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai strategi pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Integrasi teknologi ke dalam koperasi diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk desa, memperkuat inklusi keuangan, serta menumbuhkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan desa. Pada akhirnya, model ini ditujukan untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang mandiri, transparan, dan berbasis gotong royong digital.

**Tabel Model Koperasi Digital untuk Pembangunan Ekonomi Desa**

<b>Pilar Model</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Relevansi untuk Ekonomi Desa</b>
<b>Kelembagaan Transparan &amp; Akuntabel</b>	Pencatatan keuangan dan keanggotaan berbasis aplikasi dengan akses real-time dan audit otomatis.	Meningkatkan kepercayaan anggota, memperkuat akuntabilitas, dan mengurangi praktik tidak transparan.
<b>Layanan Keuangan Digital Inklusif</b>	Penyediaan simpan pinjam digital, integrasi dengan fintech, dan penggunaan dompet digital koperasi.	Memperluas akses pembiayaan bagi anggota desa tanpa harus melalui bank formal.
<b>Pemasaran Produk E- Commerce</b>	Pemanfaatan platform online, marketplace, dan toko digital koperasi untuk	Membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat



Pilar Model	Deskripsi	Relevansi untuk Ekonomi Desa
	distribusi produk desa.	daya saing produk lokal.
<b>Literasi Digital &amp; Pendampingan</b>	Pelatihan anggota tentang penggunaan aplikasi, manajemen digital, dan keamanan data.	Memberdayakan masyarakat desa agar mampu beradaptasi dengan teknologi dan meningkatkan kapasitas SDM.
<b>Infrastruktur &amp; Dukungan Kebijakan</b>	Penyediaan jaringan internet, perangkat teknologi, dan regulasi pendukung dari pemerintah.	Memastikan keberlanjutan operasional koperasi digital dan memperkuat sinergi multi-stakeholder.

### Implementasi Model dalam Konteks Desa

Implementasi model koperasi digital dalam konteks desa tidak hanya terbatas pada konsep kelembagaan, tetapi juga menyangkut bagaimana model tersebut memberi dampak nyata bagi tata kelola organisasi, akses pasar, layanan keuangan, partisipasi anggota, hingga tantangan dalam penerapannya. Kajian literatur menunjukkan bahwa koperasi digital berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi desa, asalkan mampu mengatasi hambatan teknis maupun struktural yang ada. Untuk memahami hal ini, uraian berikut menyajikan lima aspek utama yang menjadi indikator implementasi koperasi digital di pedesaan

#### 1. Efisiensi Administratif dan Transparansi

Penerapan teknologi digital dalam koperasi desa membawa dampak signifikan pada aspek administrasi dan tata kelola kelembagaan (Pelix, L., Pallangan, M. A., & Tongli, B. 2025). Sistem pencatatan keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat digantikan dengan aplikasi berbasis cloud yang mencatat setiap transaksi secara otomatis dan real-time. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko kesalahan pencatatan, tetapi juga mempersingkat waktu pengelolaan administrasi koperasi. Bagi masyarakat desa, efisiensi administratif ini menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengurus koperasi.

Selain efisiensi, transparansi informasi menjadi salah satu nilai tambah utama dari implementasi koperasi digital (Nashoha, A., & Karima, S. 2024). Anggota dapat mengakses laporan keuangan, data simpan pinjam, dan informasi kegiatan koperasi melalui aplikasi digital yang tersedia. Akses informasi yang lebih terbuka ini memperkuat akuntabilitas pengurus dan mendorong partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, koperasi digital berpotensi memperbaiki tata kelola kelembagaan yang sebelumnya dianggap tertutup dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **2. Perluasan Akses Pasar Produk Desa**

Koperasi digital juga memainkan peran penting dalam memperluas akses pasar produk desa melalui pemanfaatan platform e-commerce dan media sosial (Wibowo, G. A., *et al.* 2024). Produk-produk lokal yang sebelumnya hanya dipasarkan di tingkat desa atau pasar tradisional dapat menjangkau konsumen di luar wilayah, bahkan hingga pasar nasional. Kehadiran koperasi digital sebagai agregator pemasaran membantu anggota desa untuk memasarkan produk secara kolektif dengan biaya promosi yang lebih efisien.

Selain memperluas jangkauan pasar, digitalisasi pemasaran juga mendorong peningkatan nilai tambah produk lokal. Melalui katalog digital, desain visual menarik, serta strategi branding yang profesional, produk desa dapat bersaing dengan produk serupa dari wilayah lain. Hal ini memberi peluang bagi pelaku usaha desa untuk mendapatkan harga jual yang lebih baik dan meningkatkan daya tawar di pasar. Dengan cara ini, koperasi digital tidak hanya memfasilitasi distribusi produk, tetapi juga memperkuat posisi strategis desa dalam ekosistem ekonomi digital.

## **3. Inklusi Keuangan dan Akses Pembiayaan**

Implementasi koperasi digital secara langsung mendorong inklusi keuangan di pedesaan (Lal, T. 2019). Anggota koperasi dapat mengakses layanan simpan pinjam berbasis aplikasi, yang memungkinkan proses lebih cepat, murah, dan fleksibel. Integrasi koperasi digital dengan fintech atau layanan dompet digital juga membuka peluang bagi anggota untuk memperoleh akses pembiayaan mikro tanpa harus melalui prosedur rumit lembaga keuangan formal. Hal ini sangat relevan bagi masyarakat desa yang selama ini terkendala modal usaha karena terbatasnya akses ke bank.

Keberadaan layanan keuangan digital dalam koperasi juga berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan masyarakat desa. Anggota belajar mengelola simpanan, memahami sistem pinjaman digital, hingga mencatat arus kas usaha secara lebih terstruktur. Selain itu, akses pembiayaan yang lebih inklusif memberi dampak pada meningkatnya kemandirian ekonomi desa. Dengan adanya ekosistem keuangan digital berbasis koperasi, masyarakat dapat lebih siap menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompetitif.

## **4. Partisipasi Anggota dan Demokratisasi**

Salah satu ciri khas koperasi adalah prinsip demokrasi ekonomi, di mana setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan (Maulana, A., *et al.* 2020). Implementasi model digital memperkuat prinsip ini melalui fitur aplikasi yang memungkinkan anggota mengikuti rapat daring, memberikan suara secara elektronik, serta mengakses informasi kebijakan koperasi kapan saja. Dengan demikian, keterlibatan anggota tidak lagi terbatas oleh jarak atau keterbatasan waktu.

Partisipasi aktif anggota melalui teknologi digital juga memperkuat rasa memiliki terhadap koperasi. Transparansi data yang terbuka membuat anggota

lebih percaya pada pengurus, sehingga meningkatkan loyalitas dan partisipasi dalam kegiatan koperasi. Dalam konteks pedesaan, hal ini menjadi penting karena koperasi digital berfungsi bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wahana sosial yang mempererat kebersamaan warga desa.

## **5. Tantangan Implementasi**

Meskipun koperasi digital menawarkan banyak potensi, implementasinya di desa masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Literasi digital yang rendah membuat sebagian anggota kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi atau memahami layanan berbasis daring. Hal ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur internet di banyak desa, yang menyebabkan akses digital tidak merata. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, koperasi digital berisiko hanya dinikmati oleh sebagian kecil anggota.

Selain tantangan teknis, aspek kelembagaan juga menjadi perhatian utama. Tidak semua pengurus koperasi desa memiliki kompetensi manajemen digital yang memadai (Rohmah, M., & Kustini, K. 2025). Dibutuhkan pelatihan intensif, pendampingan berkelanjutan, dan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi atau sektor swasta. Lebih jauh lagi, keberhasilan implementasi model koperasi digital sangat bergantung pada dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah desa maupun daerah, baik dalam bentuk insentif, infrastruktur, maupun pengawasan kelembagaan.

## **PEMBAHASAN**

Hasil kajian menunjukkan bahwa model koperasi digital memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa, baik dari sisi tata kelola kelembagaan, perluasan pasar, akses pembiayaan, maupun penguatan partisipasi anggota. Namun, implementasinya tidak lepas dari sejumlah tantangan yang membutuhkan dukungan kebijakan dan sinergi berbagai pihak. Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur, pembahasan berikut dirumuskan ke dalam empat poin utama yang mewakili keseluruhan aspek yang telah dikaji.

### **1. Transformasi Tata Kelola dan Transparansi Kelembagaan**

Digitalisasi koperasi desa membawa perubahan besar pada efisiensi administratif. Pencatatan transaksi yang sebelumnya manual kini dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi berbasis cloud. Hal ini mengurangi risiko kesalahan, mempercepat proses pelaporan, dan menekan biaya operasional koperasi. Efisiensi administratif menjadi salah satu faktor yang memperkuat kepercayaan anggota terhadap pengurus, karena informasi yang dihasilkan lebih akurat dan dapat diakses kapan saja (Vial, 2019). Dalam konteks pedesaan, kepercayaan ini menjadi modal sosial penting yang menentukan keberlanjutan kelembagaan koperasi.

Selain efisiensi, transparansi juga menjadi nilai tambah signifikan dari koperasi digital. Menurut International Cooperative Alliance (ICA, 2021), prinsip keterbukaan dan akuntabilitas merupakan fondasi utama koperasi modern.



Akses anggota terhadap laporan keuangan, data simpan pinjam, dan informasi kebijakan koperasi melalui aplikasi digital memperkuat tata kelola yang lebih partisipatif. Dengan transparansi ini, koperasi desa tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran demokrasi ekonomi yang mengedepankan keadilan dan kepercayaan bersama.

## **2. Penguatan Ekonomi Desa melalui Pasar Digital dan Inklusi Keuangan**

Koperasi digital memiliki peran strategis dalam memperluas pasar produk desa. Integrasi dengan platform e-commerce dan media sosial memungkinkan produk lokal menjangkau konsumen di luar wilayah bahkan hingga tingkat nasional. Brynjolfsson dan McAfee (2014) menegaskan bahwa ekonomi digital mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar global. Bagi masyarakat desa, keberadaan koperasi digital sebagai agregator pemasaran tidak hanya memperluas jangkauan pasar, tetapi juga membantu membangun identitas merek dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Selain memperluas akses pasar, koperasi digital juga memperkuat inklusi keuangan masyarakat desa. Kehadiran aplikasi simpan pinjam digital, integrasi dengan fintech, serta pemanfaatan dompet elektronik membuka peluang baru bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari layanan keuangan formal. Menurut Sarma (2008), inklusi keuangan merupakan kunci pengentasan kemiskinan karena memberikan akses modal yang lebih adil dan terjangkau. Dalam konteks pedesaan, hal ini berarti koperasi digital berperan tidak hanya sebagai lembaga pemasaran, tetapi juga sebagai penyedia layanan keuangan yang mendorong kemandirian ekonomi.

Lebih penting lagi, akses pembiayaan yang difasilitasi koperasi digital berdampak pada peningkatan kapasitas usaha mikro dan ketahanan finansial keluarga (Dzikrullah, A. A., & Chasanah, U. 2024). Dengan akses modal yang lebih cepat dan sederhana, pelaku usaha desa dapat mengembangkan skala usahanya, memperluas jaringan produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Efek ganda ini memperkuat posisi desa dalam ekosistem ekonomi digital sekaligus memperkuat basis pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Dengan demikian, koperasi digital bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga sarana transformasi sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara lebih merata.

## **3. Partisipasi Anggota, Demokratisasi, dan Inovasi Sosial**

Partisipasi anggota merupakan inti dari identitas koperasi, dan transformasi digital memperkuat prinsip tersebut melalui ragam fitur teknologi. Rapat daring, voting elektronik, serta forum diskusi berbasis aplikasi memberi ruang yang lebih luas bagi anggota untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Prinsip demokrasi anggota, sebagaimana ditekankan International Cooperative Alliance (ICA, 2021), semakin mudah diimplementasikan ketika teknologi mendukung keterbukaan dan kesetaraan hak suara. Hal ini memperkuat

legitimasi koperasi sebagai lembaga yang berpihak pada kepentingan bersama.

Selain itu, koperasi digital dapat dipandang sebagai bentuk inovasi sosial yang menjaga relevansi kelembagaan desa di tengah perubahan zaman. Keterlibatan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi menjadi kunci dalam meregenerasi kepemimpinan koperasi dan mendorong strategi baru dalam pemasaran produk maupun layanan digital. Menurut Mulgan (2006), inovasi sosial muncul ketika komunitas menemukan cara baru untuk memecahkan masalah yang tidak dapat ditangani pendekatan tradisional. Dalam hal ini, koperasi digital menjadi sarana pembelajaran demokrasi ekonomi sekaligus medium regenerasi kelembagaan desa.

#### **4. Tantangan Implementasi dan Peran Kebijakan**

Meskipun koperasi digital menawarkan peluang besar bagi pembangunan ekonomi desa, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan mendasar. Literasi digital masyarakat desa umumnya rendah, sehingga sebagian anggota kesulitan mengakses dan menggunakan aplikasi koperasi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan internet yang belum merata dan perangkat digital yang tidak memadai, semakin memperlebar kesenjangan digital antarwilayah. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan kompetensi pengurus koperasi dalam mengelola sistem berbasis teknologi. Menurut Nguyen et al. (2022), literasi digital menjadi prasyarat utama dalam keberhasilan adopsi teknologi, khususnya di daerah pedesaan yang aksesnya terbatas.

Mengatasi hambatan tersebut memerlukan intervensi kebijakan publik dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan. Program smart village yang menekankan integrasi teknologi dalam pembangunan pedesaan dapat menjadi salah satu solusi strategis (Zhang, X., & Zhang, Z. 2020). Pemerintah perlu memastikan penyediaan infrastruktur digital yang merata serta mendorong program pelatihan intensif bagi pengurus dan anggota koperasi. Lebih jauh lagi, keberhasilan implementasi koperasi digital membutuhkan sinergi multi-stakeholder yang melibatkan akademisi, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Kolaborasi ini akan memastikan koperasi digital tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi mampu bertahan sebagai instrumen pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan (Kumar et al., 2020; Zimmerman, 2000).

## **SIMPULAN**

Kajian ini menunjukkan bahwa koperasi digital memiliki potensi strategis dalam memperkuat pembangunan ekonomi desa melalui empat aspek utama: transformasi tata kelola yang lebih transparan, perluasan akses pasar dan layanan keuangan, penguatan partisipasi anggota, serta inovasi sosial yang mendorong regenerasi kelembagaan. Digitalisasi koperasi terbukti mampu memperbaiki kelemahan koperasi konvensional, sekaligus membuka peluang baru bagi masyarakat desa dalam menghadapi tantangan ekonomi digital.

Namun, implementasi koperasi digital di desa masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia yang belum optimal. Hambatan ini menegaskan pentingnya dukungan kebijakan publik, sinergi multi-stakeholder, serta program *capacity building* yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, koperasi digital dapat menjadi instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi desa di Indonesia.

## SARAN

Pertama, perlu adanya program literasi digital dan pelatihan intensif bagi pengurus serta anggota koperasi desa agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Kedua, pemerintah desa dan daerah perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi, termasuk akses internet yang merata, guna mendukung implementasi koperasi digital. Ketiga, kolaborasi dengan perguruan tinggi, sektor swasta, dan lembaga keuangan perlu diperluas untuk memberikan pendampingan teknis, dukungan inovasi, serta akses pembiayaan.

Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan koperasi digital, baik dalam bentuk regulasi perlindungan data, insentif, maupun integrasi dengan program *smart village*. Dengan dukungan tersebut, koperasi digital dapat menjadi instrumen yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi lokal di era transformasi digital.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.
- Cao, A., Guo, L., & Li, H. (2025). Understanding farmer cooperatives' intention to adopt digital technology: mediating effect of perceived ease of use and moderating effects of internet usage and training. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 23(1), 2464523.
- Dzikrullah, A. A., & Chasanah, U. (2024). Optimalisasi peran koperasi dalam mendukung UMKM: Meningkatkan akses modal, penguasaan teknologi, dan ekspansi pasar. *Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 648-668.
- Galib, M., Ardasanti, A., Syam, J., Maulana, M., & Gunawan, A. (2025). Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Pembentukan Koperasi Digital. *ABDI DAYA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 26-39.

- International Cooperative Alliance (ICA). (2021). *Cooperative identity, values & principles*. ICA. <https://www.ica.coop>
- Izhari, F., Permana, A. I., Dhany, H. W., & Armanda, M. R. (2024). Peran Workshop Komputer dalam Literasi Digital dan Penerapan Sistem Informasi Layanan Masyarakat di Pedesaan. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(2), 2104-2110.
- Kumar, V., et al. (2020). Smart villages: Bridging the digital divide. *Technological Forecasting and Social Change*, 153, 119-229. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.119229>
- Kusumastuti, D., MH, S., & MP, S. M. S. (2022). Peran koperasi dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Unisri Press.
- Lal, T. (2019). Measuring impact of financial inclusion on rural development through cooperatives. *International Journal of Social Economics*, 46(3), 352-376.
- Maulana, A., Sy, S., & MM, S. R. (2020). *Manajemen Koperasi*. Guepedia.
- Mulgan, G. (2006). The process of social innovation. *Innovations: Technology, Governance, Globalization*, 1(2), 145-162. <https://doi.org/10.1162/itgg.2006.1.2.145>
- Nashoha, A., & Karima, S. (2024). TRANSFORMASI DIGITAL DALAM MANAJEMEN KOPERASI: PELUANG DAN TANTANGAN. *Journal Central Publisher*, 2(7), 2326-2332.
- Nguyen, M. H., Hidayat, T., & Wibowo, A. (2022). Digital literacy and technology adoption in developing countries. *Journal of Rural Studies*, 94, 45-56. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.01.004>
- Pelix, L., Pallangan, M. A., & Tongli, B. (2025). Strategi Pertumbuhan Berkelanjutan Bagi Koperasi Simpan Pinjam Marendeng Di Era Digital. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 24(1), 70-79.
- Rahmat, A., Suci, A., & Abdillah, M. R. (2023). Menuju Transformasi Desa Kreatif: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Komunitas Sains Manajemen*, 2(4), 271-278.
- Rohmah, M., & Kustini, K. (2025). Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pengurus Koperasi) Melalui Pendidikan Perkoperasian Dari Dinas Koperasi Kota Surabaya. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 5(1), 607-618.
- Sarma, M. (2008). Index of financial inclusion. *Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER) Working Paper*, 215.
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118-144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>

- Wibowo, G. A., Awaluddin, A., Triyono, B., Surya, A., & Sukardi, S. (2024). Strategi Pengembangan Koperasi Mandiri sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *JIPM: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 75-82.
- Zhang, X., & Zhang, Z. (2020). How do smart villages become a way to achieve sustainable development in rural areas? Smart village planning and practices in China. *Sustainability*, 12(24), 10510.
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of community psychology* (pp. 43–63). Springer.